



Paham Politik Identitas Menurut Francis Fukuyama
(Sebuah Kajian Filsafat Moral)

Alosius Gonsaga No
Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng
gonsagano@gmail.com
Barnabas Ohoiwutun
Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng
bertoemesce@ymail.com

Diajukan: 27 Juni 2024; Direview: 5 Juli 2024 ; Diterima: 20 Juli 2024; Dipublish: 31 Juli 20234

ABSTRACT: *This article intends to explain on Francis Fukuyama's idea of the politics of identity Fukuyama suggests that identity politics can threaten the stability of liberal democracy by dividing society based on group identities such as ethnicity, race, religion, or gender. In explaining the phenomenon of identity politics, Fukuyama highlights the demand for recognition based on the concept of thymos, a psychological aspect of human beings seeking acknowledgment. According to him, individuals and groups have a fundamental need for their dignity and identity to be recognized. When these demands are unmet, feelings of dissatisfaction and injustice can arise, leading to social and political conflict. He emphasizes the importance of moral values such as freedom, justice, and respect for individual rights. He contends that liberal democracy must be supported by a strong moral foundation to endure and thrive amidst modern challenges. Francis Fukuyama's thoughts provide valuable insights into how to sustain and strengthen liberal democracy in the contemporary era. By understanding the impact of identity politics and the demand for recognition, as well as reaffirming a commitment to fundamental moral values, societies can maintain stability and justice within the liberal democratic system.*

KEYWORDS: Francis Fukuyama, demokrasi liberal, politik identitas, tuntutan pengakuan

Pendahuluan

Pada era dewasa ini, konflik politik semakin sering dipicu oleh identitas (etnis, suku, agama, gender). Fenomena ini telah menarik perhatian Fukuyama karena potensinya untuk mengganggu integrasi sosial dan merusak kedaulatan negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui karyanya yang terkenal *The End of History and The Last Man* hingga *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, Fukuyama menyatakan bahwa konflik identitas

mungkin menjadi tantangan terbesar bagi demokrasi dan perkembangan politik abad ke-21 karena dapat mengancam proses demokrasi dan stabilitas politik.

Sebagai akademisi yang kritis terhadap fenomena politik abad ke-21, Fukuyama menganalisis dan memberikan dasar filosofis terhadap fenomena politik identitas. Ia mengeksplorasi faktor-faktor psikologis manusia yang mendasari individu dan kelompok untuk mencari pengakuan atas identitas mereka. Fukuyama mengacu pada konsep *thymos*, bagian dari jiwa manusia yang mendambakan penghargaan dan pengakuan. Menurutnya, setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk diakui martabat dan identitasnya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial.

Pemikiran Fukuyama, memberikan inspirasi moral tentang pentingnya memperkuat nilai-nilai universal seperti pengakuan terhadap martabat manusia, pengakuan akan kesetaraan, dan pengakuan akan keunikan identitas. Dalam kerangka berpikir yang sedemikian ini, penulis mencoba mengeksplorasi paham politik identitas Fukuyama sekaligus menemukan inspirasi dari gagasan yang dikemukannya. Demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang politik identitas, tantangan politik identitas, dan peluang dalam mengelola konflik tentang identitas dalam rangka membangun masyarakat yang lebih demokratis.

Hasil dan Pembahasan

Mengenal Francis Fukuyama

Yoshio Francis Fukuyama lahir di Chicago, Illinois pada 27 Oktober 1952. Ia lahir dari pasangan yang berketurunan Jepang yaitu Yashio Fukuyama dan Toshiko Kawata Fukuyama.¹ Francis Fukuyama menempuh pendidikan menengah di State College, Pennsylvania, dan mempelajari sastra sejarah Yunani kuno untuk membaca tulisan Plato dalam bahasa aslinya. Ia meraih gelar B.A dari Cornell University dan gelar Ph.D pada tahun 1974. Pada 1981, ia memperoleh gelar doktor dalam ilmu politik di Harvard University. Di Cornell, Fukuyama belajar Filsafat Politik di bawah bimbingan Allan Bloom. Selama

¹Bdk. Abdul Jabbar, "The End of History and The Last Man (Sebuah Studi Deskriptif Atas Pemikiran Francis Fukuyama)," *STIQ An-Nur* Vol. VII No. 2 (Desember 2015),121.

studi pasca sarjana (sejarah), ia pergi ke Paris selama enam bulan untuk belajar dari Roland Barthes dan Jacques Derrida.²

Fukuyama telah memberikan kontribusi penting dalam diskusi tentang perkembangan dan tantangan demokrasi liberal melalui keterlibatannya dalam bidang akademisi dan politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota dari *the Political Science Department of the RAND Corporation* dan Perencana Kebijakan dari *US Department of State*. Sebelumnya, dia pernah menjadi profesor dan direktur di *The International Development Program at the School of Advanced International Studies of the Johns Hopkins University* sejak tahun 2001 hingga 2010. Tahun-tahun sebelumnya, pada 1996 hingga 2000, ia menjadi profesor untuk kebijakan publik di *School of Public Policy at George Mason University*. Karirnya di pemerintahan juga berlangsung pada 2001 hingga 2004 ketika ia menjabat sebagai anggota Dewan Presiden untuk Bioetika.³ Fukuyama juga adalah *Senior Fellow Nomellini* di *Standford University's Freeman Spogli Institute for International Studied, Mosbacher Director of FSI's Center on Democracy, Development, and the Rule of Law (CDDRL)* dan *Director of Standford's Ford Dorsey Master's in International Policy*. Ia pernah menjabat sebagai seorang ketua dewan redaksi pada sebuah majalah yang bernama *The American Interst*. Majalah ini muncul pada tahun 2005; Fukuyama adalah salah satu pendirinya.⁴

Ia juga memperlihatkan minatnya terhadap demokrasi liberal melalui karya-karyanya, mulai dari *The End of History and The Last Man, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, The Origins of Political Order and Political Decay*, hingga *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, ia menuraikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi liberal, serta tantangan dan peluangnya di tengah dinamika politik global saat ini. Dengan demikian, Fukuyama tidak hanya menganalisis teoritis tentang demokrasi liberal, tetapi juga berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai

²Bdk. Abdul Jabpar, "The End of History and The Last Man (Sebuah Studi Deskriptif Atas Pemikiran Francis Fukuyama)," *STIQ An-Nur* Vol. VII No. 2 (Desember 2015),121.

³Bdk. Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: The Free Pres, 1992), 11.

⁴Bdk. Jabpar, "The End of History and The Last Man (Sebuah Studi Deskriptif atas Pemikiran Francis Fukuyama)," 121.

ini sebagai fondasi penting bagi kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat modern.

Demokrasi Liberal dan Fenomena Politik Identitas

Sikap optimis Fukuyama terhadap demokrasi liberal dengan gamblang diperlihatkan melalui kayarnya yang pertama yang berjudul *The End of History and The Last Man*, di mana ia menyatakan bahwa sistem demokrasi liberal merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan paling ideal. Dalam menguraikan pandangannya tersebut, Fukuyama mengangkat pandangan Hegel mengenai sejarah. Hegel sendiri menyatakan bahwa sejarah manusia adalah proses dialektis menuju kebebasan dan pengakuan universal, melalui tahapan-tahapan yang ditandai oleh konflik dan penyelesaian menuju sintesis yang lebih tinggi yakni tercapainya pemerintahan yang liberal.⁵ Fukuyama mengambil konsep Hegel ini dan menerapkannya pada teori politik modern. Dia berpendapat bahwa demokrasi liberal adalah sintesis tertinggi dari perkembangan politik karena manusia telah mencapai puncak sejarah dengan terciptanya kebebasan individu dan pengakuan universal. Karena itu, demokrasi liberal merupakan titik akhir evolusi ideologi politik manusia karena menawarkan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan fundamental manusia akan kebebasan dan pengakuan.⁶

Hal ini ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 sebagai bukti kegagalan totalitarianisme dan komunisme karena tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat akan kebebasan individu.⁷ Di sisi lain, gerakan menuju demokrasi yang telah dimulai pada tahun 1920-an oleh sekitar 35 negara kini terus meningkat jumlahnya hingga mencapai hampir 120 negara pada awal tahun 2000-an.⁸ Dengan demikian bagi Fukuyama, runtuhnya komunisme dan adopsi demokrasi liberal secara luas, sejarah telah mencapai titik "akhir". Maksudnya ialah tidak

⁵G.W.F Hegel, *The Philosophy of History* (New York: Prometheus Book, 1991), 17.

⁶Bdk. Jabpar, "The End of History and The Last Man (Sebuah Studi Deskriptif atas Pemikiran Francis Fukuyama)," 123.

⁷Bdk. Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional; Teori Kritis Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Gramedia Building, 2019), 275.

⁸Bdk. Fukuyama, *Identitas: Tuntutan Atas Martabat Dan Politik Kebencian*, vii.

ada lagi sistem pemerintahan lain yang lebih tinggi dan ideal yang bisa memenuhi aspirasi manusia untuk kebebasan dan pengakuan.⁹

Dalam perkembangannya, Fukuyama melakukan koreksi terhadap pandangannya tentang demokrasi liberal melalui bukunya yang berjudul *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Ia melihat terdapat fenomena berbeda yang berkembang di abad ke-21. Menurutnya, di abad ke-21, terjadi pergeseran dalam spektrum politik yang ditandai dengan pembelahan spektrum kiri dan kanan yang tidak lagi terfokus pada persoalan ekonomi tetapi bergeser pada isu identitas. Kelompok kanan yang semula mengkampanyekan kebebasan rasional individu dan keterbatasan intervensi negara terhadap urusan warga negara, kini bergerak pada isu-isu patriotisme. Mereka mendefinisikan diri sebagai kelompok yang berupaya untuk melindungi, mengayomi, menjaga, dan mempertahankan identitas nasional tradisional; berhubungan dengan suku, etnis, ras, agama. Sedangkan kelompok kiri yang mempersoalkan tentang kebijakan ekonomi liberal yang dianggap menyengsarakan rakyat dan memanggil negara untuk turut terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi kini bergerak lebih jauh menuju persoalan identitas yang terpinggirkan seperti LGBT, kulit hitam, imigran, pengungsi, dan lain sebagainya.¹⁰ Lebih lanjut, politisi yang mengaku sebagai pelindung kepentingan masyarakat kecil justru menggunakan identitas sebagai alat untuk mendapatkan dukungan, baik itu dari kelompok kanan maupun dari kelompok kiri.¹¹ Sebagai contoh adalah Donal Trump dengan slogan “*Make American Great Again*”. Menurut Fukuyama, demokrasi kini sedang mengalami kemunduran dan bahkan berada di ambang kehancuran. Ini tidak hanya dialami oleh Amerika Serikat dan Inggris sebagai pelopor demokrasi liberal, tetapi negara-negara lain yang telah mengadopsi demokrasi liberal sejak tahun 1990-an juga menghadapi tantangan yang serupa.¹²

⁹Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, xi.

¹⁰Bdk. George da Silva, *Catatan Kritis George Da Silva; Politik Martabat, Identitas, dan Kebencian* (Malang: Inteligencia Media, 2021), 10–11.

¹¹Bdk. Silva, 10–11.

¹²Bdk Muhammad Nurun Najib, “Kembalinya Politik Identitas dan Identitas Nasional,” *Muqoddima* Vol. 1 No. 2 (2020): 232.

Politik Identitas

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, politik identitas telah menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi sosial dan politik global. Konsep ini telah merasuk ke dalam berbagai konteks, dari kebijakan publik hingga perdebatan budaya, sehingga menimbulkan perhatian luas terhadap dinamika sosial yang kompleks dan sering kali membingungkan. Francis Fukuyama, berupaya untuk menyajikan analisis yang mendalam tentang fenomena ini dan menyoroti kompleksitas serta implikasinya bagi politik dan sosial.

Identitas adalah aspek penting dalam pemahaman tentang diri sendiri, mencakup berbagai dimensi seperti budaya, etnis, status sosial, agama, dan gender. Identitas memberikan konsep tentang diri individu atau kelompok.¹³ Istilah identitas berasal dari kata *idem* dalam bahasa Latin yang berarti sama. Dengan demikian identitas mengandung makna kesamaan atau kesatuan dengan yang lain dalam hal-hal tertentu. Selain mengandung makna kesamaan, identitas juga mengandung makna perbedaan. Ini merujuk pada karakter yang membedakan individu atau kelompok dari individu atau kelompok lain.¹⁴ Identitas terkait erat dengan konsep *self*. *Self* dimengerti sebagai kesadaran diri, kontrol diri, emosi yang membentuk pemahaman dasar tentang karakteristik dan identitas diri.¹⁵ Ini kemudian membentuk “keakuan” dan membedakannya dengan yang lain (kamu, mereka, dan dia). Hakikat dasar individu maupun kelompok tercermin dan terbentuk dari beberapa unsur yang melekat atau sengaja diletakan pada tubuh. Sejak itulah tubuh menjadi objek dan subjek politik.¹⁶

Identitas dan Politik Identitas merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Erik Erikson pada tahun 1950-an. Pada tahun 1980-an serta 1990-an muncul kembali dalam politik budaya. Identitas pada masa kontemporer memiliki banyak arti. Di satu sisi identitas

¹³Bdk. Jonny Ricardo Kocu, “Politik Identitas Dalam Birokrasi Di Kabupaten Maybrat,” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* Vol. 6 No. 1 (Juni 25, 2022): 77.

¹⁴Bdk. Budi Santoso, “Bahasa dan Identitas Budaya,” *Sahda* Vol. 1 No. 1 (September 2006): 44–45.

¹⁵Bdk. La Ode Machdani Afala, *Politik Identitas di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), 11.

¹⁶Bdk. Ubed Abdilah S, *Politik identitas etnis: pergulatan tanda tanpa identitas*, Cet. 1 (Magelang: Indonesiatara, 2002), 12.

merujuk pada kategori atau kelompok tertentu. Di sisi lain kata itu digunakan sebagai informasi dasar tentang seseorang.¹⁷

Fukuyama menanggalkan pengertian semacam itu. Dalam pandangan, Fukuyama identitas dan politik identitas bukan sekedar informasi dasar mengenai seseorang tetapi mencerminkan perjuangan kompleks untuk mendapatkan pengakuan publik terhadap nilai-nilai dan keyakinan individu. Identitas bukan hanya tentang karakteristik fisik, tetapi juga tentang nilai-nilai dan pengalaman yang membentuk pandangan diri seseorang atau kelompok yang perlu diakui dan dihargai.¹⁸ Fukuyama menulis:

Perasaan akan diri yang bermartabat memicu pencarian akan pengakuan. Tidak cukup saya memiliki harga diri jika orang lain tidak memberikan pengakuan publik. Atau, lebih buruk lagi, orang lain tidak mengakui keberadaan saya. Harga diri muncul dari penghargaan oleh orang lain. Karena manusia secara alami sangat butuh pengakuan, perasaan modern terkait identitas berkembang secara cepat menjadi politik identitas, yaitu ketika seorang individu menuntut pengakuan publik akan harga diri...¹⁹

Dengan pengertian yang sedemikian itu, Fukuyama mencoba untuk memberi pendasaran filosofis mengenai tuntutan pengakuan akan identitas yang seringkali menjadi faktor pendorong dibalik fenomena politik identitas. Terinspirasi dari Plato, Fukuyama mengangkat konsep *thymos*, *isothymia* dan *megalothymia*. Plato menggunakan istilah *thymos* untuk menunjuk bagian dari jiwa yang berhubungan dengan semangat, keberanian, dan hasrat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Rasa cinta, rasa bangga, ingin diakui, dihargai, mendapatkan pujian merupakan ciri dari *thymos*. Dengan demikian, menurut Plato *thymos* adalah sebuah bentuk nilai yang membuat orang menjadi bangga

¹⁷Bdk. Francis Fukuyama, *Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2020), 9.

¹⁸Bdk. Fukuyama, 9.

¹⁹ Finally, the inner sense of dignity seeks recognition. It is not enough that I have a sense of my own worth if other people do not publicly acknowledge it or, worse yet, if they denigrate me or don't acknowledge my existence. Self-esteem arises out of esteem by others. Because human beings naturally crave recognition, the modern sense of identity evolves quickly into identity politics, in which individuals demand public recognition of their worth...Francis Fukuyama, *Identity: the Demand for Dignity and the Politics of Resentment* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018), 6.

atau marah.²⁰ *Thymos* memiliki dua bentuk: *isothymia* yaitu dorongan untuk diakui setara²¹ dan *megalothymia* sebagai dorongan untuk diakui lebih unggul atau superior.²² Fukuyama menerjemahkan konsep *thymos* sebagai aspek psikologis manusia dorongan untuk diakui dan dihargai.²³ Menurut Fukuyama, *thymos* inilah yang menjadi dasar dari berbagai upaya perjuangan untuk memperoleh pengakuan publik atas identitas individu maupun kelompok. Karena itu bagi Fukuyama politik identitas terjadi akibat persoalan *thymos* yang tidak teratasi dengan baik.

Di sisi lain, pada abad ke-19, konsep modern tentang identitas membawa pergeseran signifikan dalam cara manusia memahami dan menghargai diri serta orang lain. Konsep ini menekankan perbedaan antara identitas batiniah dan lahiriah, di mana penilaian batin lebih diutamakan daripada pengakuan sosial yang diberikan. Identitas batiniah merujuk pada aspek internal individu seperti nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip moral yang membentuk pandangan diri mereka. Konsekuensinya ialah, martabat individu atau kelompok tidak hanya bergantung pada pandangan masyarakat, tetapi juga pada kebebasan moral dan otonomi mereka.²⁴ Prinsip-prinsip dasar identitas menegaskan bahwa identitas dan martabat sejati ditemukan dalam diri individu, bukan di luar mereka. Ini mendorong perjuangan hak asasi manusia dan kesetaraan, serta memicu perdebatan tentang hak individu untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri.²⁵ Martabat manusia, yang bersumber dari diri batiniah, dapat bervariasi dalam interpretasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Di beberapa budaya, martabat hanya terbatas pada segelintir orang, sementara di budaya lain, martabat dianggap melekat pada semua individu berdasarkan nilai intrinsik mereka.²⁶ Sementara sistem demokrasi menempatkan nilai-nilai universal seperti martabat manusia sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi memperlakukan semua individu sebagai setara dalam hak

²⁰Bdk. Bertens Kees, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 138–39.

²¹Jonny Ricardo Kocu, *Politik Identitas di Papua* (Yogyakarta: Jejeak Pustaka, 2021), 21.

²²Bdk. Fukuyama, *Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian*, x.

²³Bdk. Fukuyama, 18–22.

²⁴Bdk. Fukuyama, *Identity: the Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, 28.

²⁵Bdk. Fukuyama, *Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian*, 27–28.

²⁶Bdk. Silva, *Catatan Kritis George Da Silva: Politik Martabat, Identitas, dan Kebencian*, 12.

dan martabat, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka.²⁷ Ini memberikan dasar moral yang kuat untuk memperjuangkan pengakuan dan kesetaraan di dalam masyarakat.

Menurut Fukuyama, konsep modern tentang politik identitas yang melibatkan tiga fenomena: *thymos* sebagai kebutuhan universal akan pengakuan, perbedaan antara identitas batiniah dan lahiriah dengan penekanan pada nilai moral individu, dan konsep martabat yang melampaui pengakuan untuk semua individu²⁸ melahirkan berbagai gerakan politik identitas untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan. Ini tercermin dalam Revolusi Prancis yang menegaskan pentingnya pengakuan martabat manusia sebagai prinsip fundamental di mana revolusi ini menggeser sistem monarki absolut dengan prinsip republikan yang menekankan kesetaraan hak dan martabat di hadapan hukum. Para revolusioner pada saat itu menolak sistem feodal yang memberikan hak istimewa kepada segelintir golongan dan menuntu pengakuan yang setara sebagai makhluk yang bermartabat dalam kehidupan bernegara.²⁹

Revolusi Prancis telah menyumbang kemajuan besar dalam pengakuan hak asasi manusia, dengan meningkatnya otonomi individu. Namun hal tersebut justru melahirkan apa yang disebut sebagai individualisme ekspresif. Individualisme ekspresif merupakan salah satu ciri masyarakat modern di mana individu cenderung mengekspresikan diri secara bebas, mengutamakan kebebasan individu dan nilai-nilai pribadi di atas nilai-nilai kolektif.³⁰ Meskipun kebebasan dan keragaman opsi dalam masyarakat modern memberikan manfaat, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan terputus dari ikatan sosial.³¹ Banyak individu merasa rindu akan komunitas dan struktur kehidupan yang mereka pikir telah hilang. Mereka merasa tidak nyaman dengan kebebasan memilih yang baru mereka temui, yang pada akhirnya menyebabkan krisis identitas.³²

²⁷Bdk. Francis Fukuyama dkk, *National Identity and Social Cohesion*, Nils Holtug and Eric M. Uslaner (London: ECPR Press, 2021), 69.

²⁸Bdk. Fukuyama, *Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian*, 43.

²⁹Bdk. Fukuyama, 46.

³⁰Bdk. Fukuyama, 56.

³¹Bdk. Janson L. Powell dan Jon Hendricks, *The Welfare State in Post-Industrial Society: A Global Perspective* (New York: Springer, 2014), 142–43.

³²Bdk. Fukuyama, *Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian*, 64.

Dalam pandangan Fukuyama, politik identitas disebabkan oleh faktor *thymos* yang tidak teratasi dengan baik, yang didukung oleh pandangan masyarakat modern tentang identitas diri yang terletak dalam kedalaman aspek batiniah, nilai-nilai universal dalam demokrasi dan individualisme ekspresif yang menambah kompleksitas fenomena politik identitas. Dengan demikian, tujuan politik identitas meliputi: *pertama*, membentuk identitas bersama. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan *thymos* tetapi juga krisis identitas. Dengan membangun identitas bersama, kelompok dapat merasakan ikatan emosional dan solidaritas yang kokoh dan mengatasi persoalan *thymos* tetapi juga memperoleh arah hidup yang lebih jelas.³³ *Kedua*, politik identitas bertujuan untuk memperoleh pengakuan publik atas identitas kelompok yang telah dibentuk berdasarkan pengalaman yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa aspek-aspek identitas mereka dihormati dalam masyarakat melalui gerakan politik.³⁴ *Ketiga*, politik identitas juga bertujuan untuk memperoleh pengakuan martabat, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan harga diri dan nilai-nilai kelompok yang mungkin terpinggirkan atau diabaikan agar diperlakukan sebagai makhluk yang bermartabat.³⁵

Dalam masyarakat kontemporer, beragam bentuk politik identitas muncul sebagai ekspresi dari kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok. Nasionalisme populis, misalnya, menekankan identitas nasional yang eksklusif dan menyalahkan kelompok lain atas masalah negara. Ini sering kali muncul sebagai reaksi terhadap globalisasi dan perubahan demografis dalam suatu negara.³⁶ Politik identitas juga mengambil bentuk religionisme, di mana agama menjadi landasan untuk memperjuangkan perubahan sosial dan politik.³⁷ Gerakan seperti feminisme dan LGBT+ juga merupakan bagian penting dari politik identitas, mencerminkan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.³⁸ Meskipun beragam dalam tujuan dan strategi, politik identitas ini

³³Bdk. Fukuyama, 189.

³⁴Bdk. Fukuyama, 19.

³⁵Bdk. Fukuyama, 50–56.

³⁶Bdk. Fukuyama, 71.

³⁷Bdk. Francis Fukuyama dkk, *National Identity and Social Cohesion*, Nils Holtug and Eric M. Uslaner (London: ECPR Press, 2021), 26.

³⁸Bdk. Fukuyama, *Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian*, 126.

semua berusaha untuk memperoleh pengakuan dan memperjuangkan hak-hak yang dianggap penting bagi kelompok mereka.

Satu-satunya solusi untuk hasrat akan pengakuan ialah pengakuan universal bagi semua manusia. Namun pengakuan ini mendapat tantangan lewat bentuk-bentuk pengakuan parsial berdasarkan bangsa, agama, ras, etnis, jenis kelamin atau individu yang ingin diakui sebagai superior.³⁹ Maka dari itu, Fukuyama memperingatkan bahwa politik identitas, yang menekankan pengakuan sebagai yang lebih unggul atau superior (*megalothymia*) bisa menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Fenomena ini dapat mengakibatkan polarisasi politik yang mendalam, memperkuat retorika yang merusak, dan memungkinkan manipulasi politik oleh para politisi yang oportunistik.⁴⁰ Dampaknya meluas, termasuk disfungsi dalam sistem politik, pembatasan kebebasan berbicara, dan bahkan kemerosotan moral dalam masyarakat. Fenomena polarisasi politik yang dihasilkan dari politik identitas juga dapat menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda, yang dapat mengganggu proses demokrasi. Ini memperburuk kerentanan demokrasi terhadap manipulasi politik, serta mengurangi kemampuannya untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan melindungi kepentingan seluruh masyarakat.⁴¹

Inspirasi dan Evaluasi

Fukuyama telah memberikan landasan penting mengenai politik identitas. Ia menggambarkan bagaimana *thymos* menjadi faktor sentral dalam membentuk sikap dan perilaku politik, serta mengapa hal ini penting dalam politik kontemporer. Ia berpendapat bahwa tuntutan pengakuan yang sering ditandai oleh motivasi ekonomi sebenarnya bermuara pada kebutuhan akan pengakuan, untuk mempertahankan, memulihkan, atau memperoleh status. Dengan kata lain, sebagian besar dari apa yang kita pahami sebagai motivasi ekonomi sebenarnya mencerminkan keinginan akan kekayaan dan sumber daya, namun fakta bahwa uang dianggap sebagai penanda status dan rasa hormat. Sementara itu, kesulitan ekonomi sering dianggap oleh individu bukan sebagai

³⁹Bdk. Fukuyama, *Identitas Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian*, xiii.

⁴⁰Bdk. Joshua Makalintal, "Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition by Francis Fukuyama," *Politicon: The IAPSS Journal of Political Science* Vol. 43 (Desember 2019): 86.

⁴¹Bdk. Fukuyama, *Identitas Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian*, 145.

kekurangan sumber daya, namun sebagai hilangnya identitas. Ini memberikan inspirasi penting bagi peningkatan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan bermasyarakat:

Pertama, pentingnya pengakuan atas martabat manusia. Prinsip-prinsip martabat manusia didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang melekat sehingga patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa.⁴² Pahami hak asasi mengatakan bahwa, karena ia adalah manusia, wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu. Maka semua perbedaan semua perbedaan antara manusia: pria wanita, perbedaan dalam hal ras, kedudukan, kekayaan, pandangan dan kepercayaan, perbedaan kualitas moral, sehat atau sakit, lahir atau belum lahir, normal atau tidak normal, tidak dapat mendasari dalam penghormatan dan pengakuan atas hak-haknya sebagai manusia.⁴³ Konsekuensinya, ialah bahwa semua orang memiliki status hak yang sama baik secara sosial, politik, maupun hukum.

Kedua, Pentingnya pengakuan akan kesetaraan. Dalam demokrasi, pengakuan akan kesetaraan melibatkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di mata hukum dan politik. Artinya, tidak ada individu atau kelompok yang dianggap lebih unggul atau lebih rendah. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk diakui, didengar, dan dihormati, tanpa memandang latar belakang mereka.⁴⁴ Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar luar seperti: ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama politik atau pandangan lainnya.⁴⁵ Mengakui kesetaraan hak berarti bahwa baik yang lemah atau minoritas tetap merupakan warga masyarakat yang sama bebas dan terhormat dalam harkat kemanusiaannya.⁴⁶

⁴² Muhamad Sadi Is, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2021), 96.

⁴³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 163.

⁴⁴Bdk. Suhardono Edy dan Audifax, *Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas, Suatu Tinjauan Filsafat dan Psikologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), 47.

⁴⁵Muhamad Sadi Is, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 96.

⁴⁶Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 167.

Ketiga, peningnya pengakuan akan keunikan identitas. Setiap identitas memiliki keunikannya masing-masing. prinsip ini mendorong terciptanya cara berpikir multikulturalisme. Multikulturalisme pada dasarnya merujuk pada pandangan bahwa dunia itu bersifat plural, beragam. Multikulturalisme mendorong terciptanya pengakuan terhadap semua perbedaan.⁴⁷ Masyarakat multikulturalisme berarti keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat keanekaragaman budaya, termasuk di dalamnya bahasa, agama, adat istiadat dan pola-pola sebagai tatanan perilaku. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman dalam kesetaraan.⁴⁸ Pada akhirnya, ketiga point diatas menodorong terciptanya penegakan dan pengakuan terhadap martabat serta hak asasi manusia. Hal ini merujuk pada berbagai tindakan dalam rangka meningkatkan pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Penegakan martabat dan hak asasi manusia dilakukan karena pada dasarnya martabat dan hak asasi manusia adalah ukuran tertinggi bagi keberhasilan pembangunan suatu negara.⁴⁹

Paham politik identitas Francis Fukuyama memberikan wawasan yang berharga dalam memahami tantangan dan konflik yang dihadapi oleh masyarakat modern. Meskipun demikian, konsep ini tidak bebas dari pro dan kontra. Mutua mengkritik pemikiran Fukuyama tentang politik identitas dengan menyoroti beberapa kelemahan. *Pertama*, Fukuyama salah menyalahkan kebangkitan politik identitas pada gerakan kiri, tanpa memperhatikan bahwa politik ini adalah respons terhadap ketidakadilan ras, gender, dan seksualitas. *Kedua*, ia mengabaikan klaim gerakan keadilan rasial, gender, dan seksual terhadap distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. *Ketiga*, Fukuyama tidak menyadari bahwa demokrasi liberal menolak klaim-klaim keadilan ekonomi dari gerakan-gerakan ini. *Keempat*, rekomendasi kebijakan Fukuyama tidak efektif dalam mengubah struktur yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Mutua menegaskan bahwa fokus yang terlalu besar pada identitas dapat mengaburkan isu-isu lebih mendasar seperti kesenjangan ekonomi dan pendidikan,

⁴⁷Kuni Isna Ariesta Fauziah, "Pendidikan Multikultural Sebagai Strategi Deradikalisasi," *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* Vol. 19 No. 02 (November 2019): 212–13.

⁴⁸Syukurman, *Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan dari Aspek Multikulturalisme* (Jakarta: Kencana, 2020), 107.

⁴⁹Muhamad Sadi Is, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 99.

menghalangi pencarian solusi inklusif. Sebaliknya, ia mendorong fokus pada isu-isu yang lebih luas untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.⁵⁰ Sementara itu, Peter Drablos sebagian besar setuju dengan pandangan Fukuyama tentang politik identitas, khususnya dalam menyoroti pentingnya nilai universal dan progresif. Drablos percaya bahwa politik identitas yang terlalu sempit dapat menghambat kemajuan sosial dan menciptakan konflik. Dia menekankan bahwa teori identitas harus mempertimbangkan proses identifikasi dengan kelompok, yang dapat membantu memahami ketika kelompok kehilangan pengakuan atas kekhasan mereka.⁵¹

Terlepas dari pro dan kontra Fukuyama telah dengan jeli memperlihatkan apa yang selama ini seringkali luput dari pengamatan para sejarawan mengenai adanya motif non-material yang menggerakkan sejarah. Motif material yang selama ini menjadi dominan digusur dan digantikan dengan motif non-material yakni kebutuhan akan pengakuan. Namun, Fukuyama terkesan terlalu menyederhanakan persoalan dengan mereduksi kompleksitas fenomena politik identitas ke dalam tuntutan pengakuan, sehingga mengabaikan faktor-faktor sosial dan sejarah yang turut memengaruhi dinamika politik identitas. Purwanto dalam artikelnya “Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif”⁵² menyoroti bagaimana politik identitas sering kali berkaitan dengan aspirasi akan otonomi, terutama di kalangan kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan. Tuntutan otonomi tersebut dapat berkembang menjadi gerakan politik yang lebih besar, bahkan memperjuangkan kemerdekaan atau pembentukan negara baru. Contoh seperti pembentukan Pakistan dan Bangladesh menunjukkan bagaimana identitas etnis dapat memicu pemisahan politik dari kelompok dominan.⁵³ Selain itu, munculnya regionalisme sebagai salah satu wujud dari politik identitas di Indonesia, seperti perjuangan nasionalisme Papua justru berakar pada primordialisme. Dengan kata lain, terbentuk dan menguatnya nasionalisme Papua adalah hasil dari kelahiran dan sejarah mereka, dengan elemen-elemen spesifik penentu seperti: bentuk fisik badan, nama yang dicantumkan, bahasa

⁵⁰Bdk. Alalu D. Mutua, “Liberalism’s Identity Politics: A Response to Profesor Fukuyama,” *Univ. of Pennsylvania Journal of Law Social Change* Vol. 23 No. 1 (n.d.): 48–49.

⁵¹Bdk. Drablos 57-58

⁵² Purwanto, “Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif,” *Journal Review Politik* (Vol. 5. No. 01 Juni 2015).

⁵³I Nyoman Sudira, “Kontestasi Nasionalisme Papua: Tantangan, Refleksi Sosiologis, Dinamika, dan Transisi Modrnitas,” *Jurnal Masyarakat Indonesia* Vol. 48 No. 1 (2022): 83–84.

pertama yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dan memahami dunia, doktrinasi agama, sejarah dan asal-usul kelompok di mana mereka dilahirkan, nasionalitas dan afiliasi kesukuan, serta geografi wilayah dan budaya yang mereka warisi.⁵⁴ Berpegang pada primordialisme dengan faktor psikobiologis yang mereka anggap paling penting, masyarakat Papua mengembangkan rasa kepemilikan yang kuat terhadap tanah air mereka. Hal ini memperkuat gerakan nasionalisme populis di Papua.⁵⁵

Meskipun demikian, teori Fukuyama tetap relevan dalam memahami dinamika politik kontemporer. pemikirannya memperkaya perspektif dalam memahami fenomena politik identitas tetapi juga memberikan inspirasi bagi pembangunan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Penutup

Dalam era kontemporer yang dipenuhi dengan dinamika politik yang kompleks, teori politik identitas yang dikembangkan oleh Francis Fukuyama memberikan pandangan yang berharga dalam memahami tantangan dan konflik yang dihadapi oleh masyarakat modern. Melalui kerangka kerja yang dikembangkannya, Fukuyama menyoroti pentingnya nilai-nilai universal dalam mengatasi pertentangan identitas yang sempit, serta menggambarkan bagaimana identitas dapat mempengaruhi perilaku politik, polarisasi, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat.

Pemikiran Fukuyama mendorong kita untuk melihat jauh di luar batas-batas identitas dan mengakui kebutuhan akan pengakuan sebagai faktor kunci dalam membentuk sikap dan tindakan politik individu dan kelompok. Dengan demikian, kontribusi Fukuyama terhadap pemahaman politik identitas tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang peran identitas dalam dinamika politik kontemporer, tetapi juga menawarkan kerangka kerja untuk mencari solusi yang inklusif dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan budaya yang kompleks.

⁵⁴I Nyoman Sudira, 83–84.

⁵⁵Mukhtadi, “Strategi Pemerintahan dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia,” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* Vol. 7 NO. 2 (2022): 85–86.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan institusi politik untuk memperhatikan kebutuhan akan pengakuan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik. Langkah-langkah kebijakan yang inklusif, didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap identitas dan aspirasi masyarakat, akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan demokratis.

Daftar Pustaka

- Budi Santoso. “Bahasa dan Identitas Budaya.” *Sahda* Vol. 1 No. 1 (September 2006).
- Edy, Suhardono, dan Audifax. *Membaca Identitas: Multirealitas dan Reinterpretasi Identitas, Suatu Tinjauan Filsafat dan Psikologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Franz Magnis-Suseno. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Fukuyama, Francis. *Identitas Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2020.
- . *Identity: the Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.
- . *The End of History and The Last Man*. New York: The Free Press, 1992.
- Fukuyama, Francis, dkk., *National Identity and Social Cohesion*. Nils Holtug and Eric M. Uslaner. London: ECPR Press, 2021.
- G.W.F Hegel. *The Philosophy of History*. New York: Prometheus Book, 1991.
- I Nyoman Sudira. “Kontestasi Nasionalisme Papua: Tantangan, Refleksi Sosiologis, Dinamika, dan Transisi Modernitas.” *Jurnal Masyarakat Indonesia* Vol. 48 No. 1 (2022).
- Jabpar, Abdul. “The End of History and The Last Man (Sebuah Studi Deskriptif atas Pemikiran Francis Fukuyama).” *STIQ An-Nur* Vol. VII No. 2 (Desember 2015).
- Janson L. Powell, dan Jon Hendricks. *The Welfare State in Post-Industrial Society: A Global Perspective*. New York: Springer, 2014.
- Kees, Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Kocu, Jonny Ricardo. “Politik Identitas dalam Birokrasi di Kabupaten Maybrat.” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* Vol. 6 No. 1 (25 Juni 2022).
- . *Politik Identitas di Papua*. Yogyakarta: Jejeak Pustaka, 2021.

- Kuni Isna Ariesta Fauziah. “Pendidikan Multikultural Sebagai Strategi Deradikalisasi.” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* Vol. 19 No. 02 (November 2019).
- La Ode Machdani Afala. *Politik Identitas di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Makalintal, Joshua. “Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition by Francis Fukuyama.” *Politicon: The IAPSS Journal of Political Science* Vol. 43 (Desember 2019).
- Muhamad Sadi Is. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mukhtadi. “Strategi Pemerintahan dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia.” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* Vol. 7 N0. 2 (2022).
- Mutua, Alalu D. “Liberalism’s Identity Poltics: A Response to Profesor Fukuyama.” *Univ. of Pennsylvania Journal of Law Social Change* Vol. 23 No. 1 (t.t.).
- Nurun Najib, Muhammad. “Kembalinya Politik Identitas dan Identitas Nasional.” *Muqoddima* Vol. 1 No. 2 (2020).
- Silva, George da. *Catatan Kritis George Da Silva; Politik Martabat, Identitas, dan Kebencian*. Malang: Inteligensia Media, 2021.
- Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional; Teori Kritis Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Gramedia Building, 2019.
- Syukurman. *Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan dari Aspek Multikulturalisme*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ubed Abdilah S. *Politik identitas etnis: pergulatan tanda tanpa identitas*. Cet. 1. Magelang: Indonesiatara, 2002.